

Nilai Indeks Inovasi Daerah Kab. HSS Tahun 2023

Oleh :

H. Muhammad Afif Bizri, SH,M.Hum, Hairul Ikhwan, S.Hut.
Hj. Rusmaliah, S.Hut. Yunita Anggeriana, S.Hut.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan.



Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktek-praktek inovasi yang baik secara kontinu perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah satunya adalah melalui penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan gambaran bagaimana aksi praktek - praktek penyelenggaraan inovasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah berikut dampaknya.

Ringkasan

Inovasi daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah. Pengaturan ini pada prinsipnya memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan kearifan lokal yang pada gilirannya dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Jumlah Inovasi yang dilaporkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Tahun 2023 adalah sebanyak 105 inovasi dengan status 96 inovasi yang sudah masuk dalam penerapan dan sisanya masih belum masuk penerapan.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai indeks sebesar 70,41 (Kategori Sangat Inovatif), dengan ini terjadi peningkatan nilai indeks sebesar 3,37 kalau dibandingkan dengan tahun 2022 dimana Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai indeks 67,04 (Kategori Sangat Inovatif). Dengan ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil menjadi Kabupaten Terinovatif selama 5 (lima) tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2019 hingga 2023.

Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan kedepannya mulai focus pada inovasi dengan menitikberatkan pada indikator persentase inovasi daerah yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Sehingga sejalan dengan pola tematik yang ada di IGA. Adapun terkait tematik yang dibangun kedepan terkait inovasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- 1) Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, & Pendapatan Per Kapita
- 2) Prevalensi Stunting
- 3) Pertumbuhan Ekonomi
- 4) Inflasi
- 5) Investasi
- 6) Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)

Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

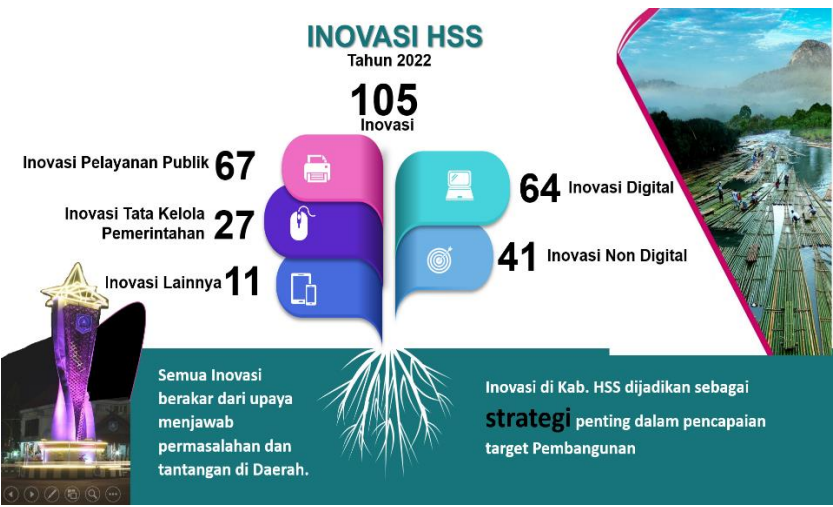
Dalam Indeks ini ada beberapa indikator yang sangat menentukan indikator Satuan Pemerintah Daerah (SPD) terdiri dari 16 indikator dan indikator Satuan Inovasi Daerah (SID) sebanyak 20 indikator. Indeks Inovasi Daerah dapat menggambarkan beberapa kondisi, seperti : Institusi, SDM dan Penelitian, Infrastruktur, Kecanggihan produk, Kecepatan Bisnis Proses, Output Pengetahuan Teknologi, dan Hasil Kreatif.

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan besar Inovasi Daerah yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah.

TINJAUAN KEBIJAKAN

Adapun proses pengukuran Indeks Inovasi Daerah pada Sistem Innovative Government Award – IGA di Kemendagri dalam setiap tahunnya terus melakukan perubahan dan perbaikan. Kalau pada tahun sebelumnya lebih kearah kuantitas namun mulai Tahun 2021 sampai 2023 mulai berimbang kearah kualitas. Inovasi daerah yang dilaporkan oleh pemda dapat diklasifikasikan dalam 3 bentuk, yaitu : a). Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: e-kinerja, e-evaluasi, e-monitoring, ekepegawaian, e-arsip dan lain sebagainya; b). Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat atau pihak lainnya seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya; dan c). Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Inovasi daerah juga diklasifikasikan dalam jenis inovasi, yang mana inovasi daerah terbagi dalam 2 jenis yaitu : a). Inovasi Digital Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan platform dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak; b). Inovasi Nondigital Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan Standard Operational Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.



Adapun jumlah Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 yang dilaporkan pada Tahun 2023 dan menjadi dasar indikator penilaian nilai indeks inovasi daerah tahun 2023, adalah sebanyak 105 inovasi dengan status 96 inovasi yang sudah masuk dalam penerapan dan sisanya masih belum masuk penerapan.

Inovasi-inovasi ini juga terbagi kedalam klasifikasi jenis dan bentuk sebagaimana tergambar dalam gambar di sebelah. Dari segi bentuk ada 67 inovasi pelayanan public, 27 inovasi tata Kelola pemerintahan, dan 11 inovasi lainnya. Kalau dilihat dari segi jenis maka ada 64 inovasi digital dan 41 inovasi non digital.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai indeks sebesar 70,41 (Kategori Sangat Inovatif), dengan ini terjadi peningkatan nilai indeks sebesar 3,37 kalau dibandingkan dengan tahun 2022 dimana Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai indeks 67,04 (Kategori Sangat Inovatif). Dengan ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil menjadi Kabupaten Terinovatif selama 5 (lima) tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2019 hingga 2023.

Dengan nilai indeks sebesar 70,41 (Kategori Sangat Inovatif), Kab HSS masuk kategori Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Predikat Sangat Inovatif, yang mana diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan predikat sangat inovatif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah atau pemerintah daerah yang memperoleh indeks inovasi daerah lebih dari 60,00.

Pada tahun 2023 ada beberapa penambahan, seperti pembagian regional, mengingat sebaran penerima IGA selama ini didominasi oleh Kawasan Indonesia Bagian Barat maka dilakukan pemberian penghargaan pada pemerintah daerah di kawasan lain. Adapun skema pembagian wilayah berdasarkan teritorial dan sebaran wilayah administratif. Wilayah regional sebagai berikut: a) Regional I: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Sumatera; b) Regional II: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Jawa; c) Regional III: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Kalimantan dan Sulawesi; d) Regional IV: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Maluku; dan e) Regional V: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Wilayah Pulau Papua.

Gambaran pembagian regional pada penilaian IGA Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Pemerintah daerah dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai setelah divalidasi dan quality control akan menghasilkan nilai indeks inovasi daerah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Dalam proses mengklasifikasikan Daerah pada beberapa kategori, Kemendagri dalam beberapa tahun terakhir memiliki beberapa perubahan dalam skala nilainya, dan pada tahun 2023 pengklasifikasiannya sama dengan tahun 2022 kemarin. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Kategori	2020	2021	2022 - 2023
Sangat Inovatif	≥ 1001	60,00-100,00	60,01-100,00
Inovatif	501 – 1000	30,00-59,99	35,00-60,00
Kurang Inovatif	1 – 500	0,01-29,99	0,01-34,99
Tidak Dapat Dinilai	0	0	0

Nilai indeks Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 70,41 masuk dalam Kategori Sangat Inovatif, dan sesuai SK Kemendagri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023, dengan Kabupaten tertinggi nilai indeksnya adalah Kabupaten Wonogiri dengan nilai 91,72, lalu Kabupaten Situbondo 87,11, Kabupaten Banyuwangi 86,94, Kabupaten Bangka 84,98, dan seterusnya. Secara nasional posisi nilai indeks Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada posisi ke-14. Adapun secara Regional III Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menduduki di posisi ke-2, setelah Kabupaten Tabalong dengan nilai indeks 82,69.



Data profil inovasi daerah secara otomatis akan menghasilkan skor dan peringkat/ranking indeks inovasi daerah, yang dibentuk oleh indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dan indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). Selanjutnya hasil tersebut dianalisis dan diseleksi oleh Tim Penilai. Hasil analisis Tim Penilai menghasilkan nominator bagi Pemerintah Daerah inovatif untuk mengikuti tahap selanjutnya. Nilai indeks inovasi dapat dijabarkan dalam beberapa unsur, seperti ; institusi, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, kecanggihan produk, kecepatan bisnis proses, output pengetahuan dan teknologi, jumlah inovasi dan hasil kreatif dan ekosistem inovasi dan kajian.

Inovasi di ajang Innovative Government Award (IGA) 2023 memiliki isu penting / tematik yang menjadi highlight kebijakan pemerintah saat ini seperti :

- 1) Digitalisasi Layanan Pemerintahan
Inovasi daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Lebih dalam digitalisasi dikelompokkan lagi dalam 2 sub kelompok yaitu:

- a. Digitalisasi Administrasi Inovasi daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan aplikasi atau sistem lain.
 - b. Smart city Inovasi daerah dalam rangka optimalisasi penggunaan layanan digital yang mengintegrasikan berbagai layanan digital atau inovasi digital dalam aplikasi. Aplikasi tersebut di dalamnya terdapat beberapa fitur dan sistem yang saling terintegrasi. Konsep smartcity ini memerlukan sinergi dalam berbagai aspek seperti tata kelola organisasi, penggunaan IT, ketersediaan infrastruktur, pemanfaatan informasi dan data yang akurat (bigdata di daerah), serta kompetensi SDM dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah daerah.
- 2) Penanggulangan Kemiskinan
- Inovasi daerah yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
- 3) Kemudahan Investasi
- Inovasi daerah yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah berdasarkan prinsip: a. Kepastian hukum; b. Kesetaraan; c. Transparansi; d. Akuntabilitas; dan e. Efektif dan efisien.
- 4) Prioritas aktual presiden
- Tematik prioritas aktual presiden adalah Stunting, Inflasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Green economy, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), Tata kota (City Branding), dan Stabilitas keamanan dan kehidupan sosial.

Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait inovasi menitikberakan pada indikator persentase inovasi yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah, sehingga sejalan dengan pola tematik yang ada di IGA 2023. Adapun terkait tematik yang dicoba dibangun kedepan terkait inovasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- 1) Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, & Pendapatan Per Kapita
- 2) Prevalensi Stunting
- 3) Pertumbuhan Ekonomi
- 4) Inflasi
- 5) Investasi
- 6) Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)

Pengembangan inovasi berdasarkan tematik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejalan dengan pohon kinerja yang dibangun di Organisasi Perangkat Daerah, dan terbentuk pola kerja yang saling mendukung. Pola dukungan dalam tematik inovasi di Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat dalam pola sebagai berikut :

Tematik	Perangkat Daerah	Tematik	Perangkat Daerah
Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, & Pendapatan Per Kapita	Leading Sector	Leading Sector	
	Dinas Sosial	Sekretariat Daerah (Bagian Ekobang)	
	Dinas Pertanian	Pendukung	
	Dinas Perikanan	Dinas Perdagangan	
	Dinas NakerkopUKP	Dinas Pertanian	
Inflasi	Dinas PUTR	Dinas Perhubungan	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Ketahanan Pangan	
	Pendukung	Dinas PUTR	
	DinasPERAKPLH (Bidang Permukiman)	Dinas Kominfo	
	Dinas PPKBPPPA (Bidang PPPA)		
Prevalensi Stunting	Dinas Porapar (Bidang Pariwisata, Bidang Pemuda dan Olahraga)		
	Dinas PMD		
	Leading Sector		
	Dinas Kesehatan		
	Dinas PPKBPPPA		
Pertumbuhan Ekonomi	Pendukung		
	Dinas Ketahanan Pangan		
	Dinas PUTR (Bidang Cipta Karya)		
	Dinas PMD		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bidang PAUD)		
Investasi	Dinas Pertanian		
	Dinas Perikanan		
	Dinas Perdagangan		
	Dinas NakerkopUKP		
	Dinas PUTR		
P3DN	Leading Sector		
	Sekretariat Daerah (UKPBJ)		
	Pendukung		
	Dinas Perdagangan		
	DisnakerkopUKP (Bidang Koperasi, Bidang UMKM)		